

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem transportasi merupakan salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Masalah transportasi seringkali menjadi masalah yang umum terjadi dimasyarakat yang mana tidak hanya menyangkut prasarana jalan raya secara fisik akan tetapi masalah yang paling besar adalah mengenai pengaturan lalu lintas transportasi itu sendiri karena apabila lalu lintas tersebut berjalan lancar maka akan timbul kelancaran dalam berlalu lintas di daerah tersebut. Sistem transportasi haruslah dikembangkan dengan baik demi mewujudkan ketertiban, ketentraman dan kenyamanan dalam berlalu lintas serta dapat mendukung perkembangan kemajuan ekonomi daerah itu sendiri. ¹

Transportasi merupakan komponen utama dalam sistem hidup dan kehidupan, sistempemerintahan, dan sistemkemasyarakatan. Kondisi sosial demografis wilayah memiliki pengaruh terhadap kinerja transportasi di wilayah tersebut. Tingkat kepadatan penduduk akan memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan transportasi melayani kebutuhan masyarakat. Di perkotaan, kecenderungan yang terjadi adalah meningkatnya jumlah penduduk yang tinggi karena tingkat kelahiran maupun urbanisasi. Tingkat urbanisasi berimplikasi pada semakin padatnya penduduk yang secara langsung maupun tidak langsung mengurangi daya saing dari transportasi wilayah.²

¹Muhammad Aan Burhanudin. (2018). Peran Dinas Perhubungan Dalam Optimalisasi Fungsi Terminal Balaraja Kabupaten Tangerang (Periode 2016-2017). Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas sultan ageng tirtayasa serang. Hal 1

²Fauzi, M. G., Susanti, E., & Rusli, B. (2019). Analisis Peraturan Menteri No 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Menurut Teori the Managerial Decision-Making Process E. F. Harrison. *Responsive*, Volume 1 Nomor 2, 56.

Terminal merupakan simpul dalam sistem jaringan transportasi jalan yang berfungsi pokok sebagai pelayanan umum yaitu tempat untuk naik turun penumpang atau bongkar muat barang, untuk pengendalian lalu lintas dan angkutan kendaraan umum, serta sebagai tempat pemberhentian intra dan antar moda transportasi. Sesuai dengan fungsi tersebut, maka penyenggaraan terminal berperan menunjang tersedianya jasa transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang selamat, aman, cepat, tepat, teratur dan dengan biaya yang terjangkau masyarakat.³

Kota Atambua terletak di Pulau Timor, sebagai kota yang merupakan pusat Pemerintahan Kabupaten Belu, pusat perdagangan, pendidikan, dan perkantoran. Kota Atambua memerlukan sarana transportasi yang baik dan bisa menunjang berbagai aktivitas masyarakat pada umumnya. Kota Atambua memiliki jalur perhubungan melalui darat dari jalur timur yaitu terminal Lolowa di Jantung Kota dan Naresa di Kelurahan Ludak Kecamatan Atambua Selatan dan dari barat terminal Umanen serta dari arah Utara yaitu Fatubena.⁴

Untuk memperlancar arus transportasi, maka diperlukan sarana dan prasarana yang menunjang, salah satunya adalah angkutan umum. Menurut Undang - Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Terminal merupakan salah satu sarana dan prasarana umum yang sangat diperlukan sebagai pelayanan umum, antara lain adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.⁵ Selain terminal resmi, biasanya sopir angkut/bus menciptakan terminal bayangan. Terminal bayangan

<https://doi.org/10.24198/responsive.v1i2.20675>. Hal 56

³Andriyanti, D., & Mudiyo, R. (2019). Dampak Terminal Mangkang Kota Semarang Dan Permasalahan Di Kawasan Sekitarnya Studi Kasus: Terminal Mangkang Semarang. *Jurnal Planologi*, Volume 14 Nomor 1 . <https://doi.org/10.30659/jpsa.v14i1.3856>. Hal 2

⁴<http://www.nttonlinenow.com/new-2016/2017/05/23/dishub-belu-fungsikan-terminal-tipe-b-lolowa/diakses> tanggal 8 Juli 2020

⁵Pasal 1 ayat (13). Undang - Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

adalah kegiatan ilegal yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang bisa terlihat dari keseman-mena oknum tersebut seperti dalam mengalokasikan lahan terminal bayang yang tidak pada tempatnya, pungutan yang tidak tahu kemana arah hasil dari pungutan tersebut.

Berdasarkan hasil observasi awal ditemukan bahwa masih banyak penumpang yang naik dan turun melalui terminal bayangan Naresa karena akses yang mudah dan dekat dengan Kota Atambua meskipun sistem pemberhentian terminal bayangan tersebut menimbulkan sisi negatif bagi pengguna yang lain apalagi dengan jumlah bus Angkutan yang melayani Rute Atambua-Kupang dan Atambua-Kefa sebanyak 61 Bus. Adapun dari 61 Bus bus Angkutan yang melayani Rute Atambua-Kupang dan Atambua-Kefa hanya 32 Bus yang menggunakan Tiket dan masuk terminal sedangkan 29 Bus tidak menggunakan tiket dan tidak masuk terminal sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus dari Dinas Perhubungan Kabupaten Belu. Terminal bayangan adalah kegiatan ilegal yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang bisa terlihat dari keseman-mena oknum tersebut seperti anggapan masyarakat atau calon penumpang yang mengira bus Antar Kota dalam Propinsi (AKDP) terutama jurusan Atambua-Kupang atau mobil travel mempunyai terminal tersendiri.

Gambar 1
Kondisi Terminal Bayangan KM3 Kota Atambua



Gambar diatas merupakan kondisi terminal bayangan KM3 Kota Atambua yang terletak di Kelurahan Fatukbot Kecamatan Atambua Selatan dimana Bus Jurusan Atambua-Kefa dan Kupang menunggu penumpang dan letaknya yang sangat strategis dan mudah diakses serta dekat dengan Kota Atambua.

Hasil observasi didukung dengan pendapat dari Kepala Dinas Perhubungan Bapak Anton Suri alasan adanya penertiban Bus di Terminal Bayangan KM3 Motabuik karena adanya laporan dan surat dari masyarakat yang merasa terganggu dengan keberadaan terminal bayangan serta membuat pemandangan sebrawut dan menghalangi badan jalan

Dari latar belakang diatas telah mendorong peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul: **KEBIJAKAN TRANSPORTASI DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENERTIBKAN BUS ANTAR KOTA DI TERMINAL BAYANGAN KM 3 KOTA ATAMBUA KABUPATEN BELU**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas maka, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Kebijakan Transportasi Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Bus Antar Kota Di Terminal Bayangan Km 3 Kota Atambua Kabupaten Belu ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Fungsi Kebijakan Transportasi Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Bus Antar Kota Di Terminal Bayangan Km 3 Kota Atambua Kabupaten Belu.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis/Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai implikasi teoritis tentang Fungsi Kebijakan Transportasi Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Bus bagi Universitas Katolik Widya Mandira dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik serta khususnya bagi Jurusan Ilmu Pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Melalui penelitian ini diharapkan dapat member masukan berupa hasil atau laporan penelitian yang digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya
- b. Agar dapat dijadikan pertimbangan bagi Dinas Perhubungan dalam Menertibkan Bus Antar Kota Di Terminal Bayangan Km 3 Kota Atambua Kabupaten Belu.